

## ABSTRAK

Tanti Pradita Hutami (0910611030), Implementasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi ditinjau dari UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus putusan nomor 1884/pid.b/2010/pn.tng). Dibawah bimbingan Diah Ratu Sari SH, MH.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas seperti pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Pelaporan dalam gratifikasi mengandung sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada di tangan terdakwa meskipun demikian Jaksa Penuntut Umum tetap memberikan keterangan sesuai dengan keyakinannya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Agar pembalikan beban pembuktian berjalan efektif maka penerapannya harus sesuai dengan pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian karena sebenarnya sistem ini bertentangan dengan KUHAP dan bisa melanggar hak dari si terdakwa.

Kata Kunci : Gratifikasi, Sistem Pembalikan beban Pembuktian

## **ABSTRACT**

Tanti Pradita Hutami (0910611030), system implementation reversal of the burden of proof in criminal gratification in terms of Act No. 20 of 2001 on the eradication of corruption (case study number 1884/pid.b/2010/pn.tng decision). Under the guidance of Diah Ratu Sari SH, MH.

Gratification is the provision in a broad sense as giving money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, travel, free medical treatment and other facilities that received at home and abroad using electronic means and without means electronics. Reporting in systems containing gratification reversal burden of proof is the burden of proof is in the hands of the defendant nevertheless Prosecutors continue to provide information in accordance with his beliefs. The method used in this paper is the normative legal research methods, normative legal research conducted through a review of the legislation and other legal materials related to this thesis. To be effective reversal of the burden of proof that his application should be in accordance with article 37 of Law number 20 of 2001 on the eradication of corruption. The obstacles encountered in the implementation of the system due to the reversal of the burden of proof is actually the system is contrary to the Criminal Procedure Code and could violate the rights of the accused.

Keywords: Gratification, the burden of proof Reversal System